

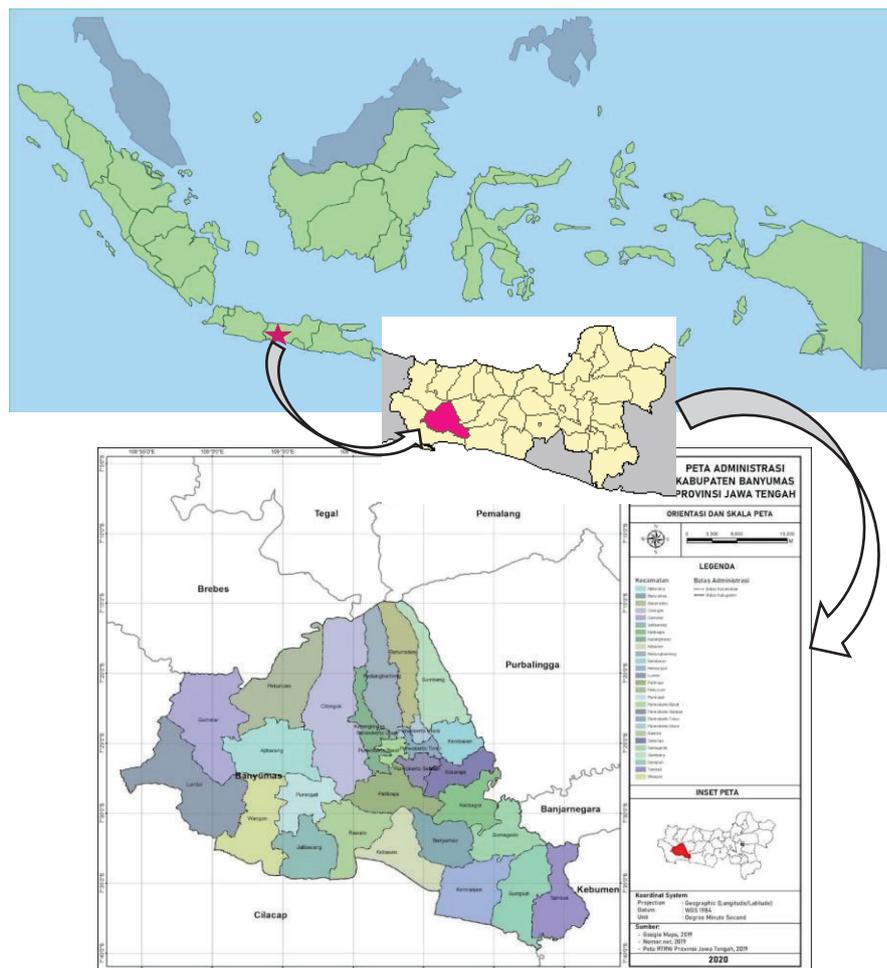
BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

Pada sub bab ini, penulis menjelaskan gambaran singkat tentang Kabupaten Banyumas sebagai lokus penelitian yang mencakup kondisi geografis, kondisi demografis, dan konstelasi politik.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Banyumas



Sumber: Diolah oleh peneliti

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Banyumas berada di belahan selatan garis khatulistiwa yang terletak diantara $108^{\circ} 39' 17''$ – $109^{\circ} 27' 15''$ garis Bujur Timur dan diantara $07^{\circ} 15' 05''$ – $07^{\circ} 37' 10''$ garis Lintang Selatan, sehingga wilayah yang beribukota di Purwokerto ini memiliki iklim tropis basah dan memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara $21,4^{\circ} \text{C}$ – $30,9^{\circ} \text{C}$. Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki luas sekitar 1.327,60 km^2 atau setara 4,04% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah daratan dan pegunungan mendominasi wilayah Kabupaten Banyumas, yang mana terdapat pegunungan Slamet yang masih aktif dengan ketinggian puncak sekitar 3.400 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah barat daya Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan tujuh kabupaten lain yang diantaranya: sebelah utara yakni berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes; serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara.

Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kelurahan, dan 301 (tiga ratus satu) desa. Wilayah Kecamatan Purwokerto Barat merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Banyumas dengan luas sekitar 7,40 km^2 . Sedangkan kecamatan dengan wilayah

terluas ada di Kecamatan Cilongok dengan luas sekitar 105,34 km². Kabupaten Banyumas memiliki wilayah strategis yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat aktivitas perekonomian masyarakat Banyumas. Wilayah yang dimaksud berada di kawasan Kota Purwokerto yang terdiri dari Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur.

2.1.2 Kondisi Demografis

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas per tahun 2021 sekitar 1.789.630 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,95% per tahunnya. Kemudian rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banyumas yakni 101.37 dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sekitar 900.919 jiwa serta penduduk berjenis kelamin perempuan sekitar 888.711 jiwa. Adapun jumlah penduduk terbanyak di wilayah Kabupaten Banyumas dimiliki oleh Kecamatan Cilongok yakni 125.349 jiwa atau 7% dari total populasi, kemudian diikuti oleh Kecamatan Ajibarang dengan jumlah penduduk sebanyak 102.808 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas sebesar 1348 orang per km². Wilayah dengan penduduk paling padat adalah Kecamatan Purwokerto Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 7.165 orang per km² (BPS Kabupaten Banyumas, 2022).

2.1.3 Konstelasi Politik

Kabupaten Banyumas sejak tahun 2018 dipimpin oleh Ir. H. Achmad Husein yang merupakan seorang petahana dengan masa jabatan selama dua periode (periode 2013-2018 dan periode 2018-2023). Pemilu yang diselenggarakan terakhir kalinya di Kabupaten Banyumas yakni Pemilu tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) tahun 2018. Pemilu Serentak tahun 2019 diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Proses pemilihan yang dilakukan untuk memperoleh jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyumas tahun 2018 diikuti oleh dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 1 atasnama Mardjoko dan Ifan Haryanto, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 atasnama Achmad Husein dan Sadewo Tri Lastiono.

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas melibatkan sekitar 1.302.439 pemilih dengan penggunaan hak pilih hanya sebesar 923.626 dan tingkat partisipasi 70,91%. KPU Kabupaten Banyumas melalui putusan nomor 52/PL.03.6-Kpt/3302/KPU-Kab/VII/2018 menetapkan pasangan calon Husein – Sadewo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyumas terpilih dengan perolehan suara terbanyak sebesar 515.329 suara atau 55,8%. Berikut disajikan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon beserta partai pengusungnya.

Tabel 2. 1 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2018

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. H. Mardjoko, M.M. dan Dr. Ir. H. Ifan Haryanto, M.Sc.	Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PKS, PAN, PPP	408.297	44,02%
2	Ir. H. Achmad Husein dan Drs. H. Sadewo Tri Lastiono	PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Nasdem	515.329	55,8%

Sumber: KPU Kabupaten Banyumas, 2019

Pada Pemilu tahun 2019, terdapat 9 (sembilan) partai politik yang berhasil menduduki 50 kursi di DPRD Kabupaten Banyumas. Kesembilan partai politik tersebut yakni: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), menduduki 17 kursi dengan perolehan suara 34,17%; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menduduki 8 kursi dengan perolehan suara 15,89%; Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menduduki 7 kursi dengan perolehan suara 9,61%; Partai Golongan Karya (Golkar), menduduki 6 kursi dengan perolehan suara 11,07%; Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menduduki 4 kursi dengan perolehan suara 11,07%; Partai Amanat Nasional (PAN), menduduki 3 kursi, dengan perolehan suara 5,00%; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menduduki 2 kursi dengan perolehan suara 5,19%; Partai Nasional Demokrasi (NasDem), menduduki 2 kursi dengan perolehan suara 5,13%; Partai Demokrat, menduduki 1 kursi dengan perolehan suara 3,70%.

2.2 Sejarah Pemilihan Kepala Desa

Dari sudut pandang sejarah, proses memilih pemimpin di desa sudah ada secara organik sebelum masa kemerdekaan. Sistem pengangkatan kepala desa pertama kali melalui pemilihan oleh rakyat sudah ada sejak zaman Raffles (Letnan Jenderal Inggris) di tahun 1814. Akan tetapi sistem tersebut dibantah oleh beberapa sarjana hukum Belanda yang mengatakan bahwa rakyat di desa tidak mengenal sistem pemilihan dengan mengadakan calon-calon dan pemilihan oleh rakyat, melainkan dipilih melalui musyawarah dan mufakat (Kartohadikoesoemo, 1953:157).

Kemudian pada masa penjajahan Belanda, proses penyelenggaraan Pilkades diadakan secara langsung oleh masyarakat di Jawa, meskipun yang memiliki hak untuk memilih hanya terbatas pada masyarakat kalangan atas atau elit desa. Proses pemilihan kemudian menjadi lebih inklusif ketika masa penjajahan Belanda berakhir dan Jepang mengambil alih kekuasaan. Di masa ini, Pilkades diselenggarakan secara langsung oleh semua kalangan, namun yang berhak untuk memilih masih terbatas hanya pada perwakilan kepala keluarga saja.

Beralih ke era pasca kemerdekaan, penyelenggaraan Pilkades dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, dimulai dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dinamika pengaturan Pilkades di Indonesia yang terus berubah sejak pasca kemerdekaan diuraikan dalam tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Dinamika Regulasi Pemilihan Kepala Desa di Indonesia

UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa	UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah	UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah	UU No. 6/2014 tentang Desa
<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa dipilih secara langsung tetapi ada intervensi aparat pelaksana lapangan - Kepala desa terpilih harus disetujui oleh Bupati dan Gubernur (Desa sebagai perpanjangan tangan Supra desa) - Masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa - Masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa - Masa jabatan 6 (enam) tahun dan dipilih kembali 1 (satu) kali 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa - Masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali 3 (tiga) kali

Sumber: Peraturan BPK

Pada dewasa ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat berimplikasi terhadap pelaksanaan Pilkades. Substansi pelaksanaan Pilkades dalam undang-undang tersebut selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.

2.3 Pilkades Serentak Kabupaten Banyumas Tahun 2021

Pilkades di Kabupaten Banyumas diselenggarakan secara serentak pada tahun 2021 diikuti oleh 27 desa yang ada di 14 kecamatan. Pilkades Serentak tahun 2021 ini menghadirkan sebanyak 81 calon kepala desa. Proses pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pilkades ini dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Desember 2021. Sementara itu, prosesi pelantikan calon kepala desa terpilih dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Desember 2021 di Pendapa Sipanji Purwokerto oleh Bupati Banyumas yakni Ir. Achmad Husein. Berikut ini disajikan Tabel 2.3 tentang perolehan suara calon kades terpilih dari masing-masing desa yang mengikuti Pilkades Serentak Kabupaten Banyumas tahun 2021.

Tabel 2. 3 Daftar Perolehan Suara Calon Kades Terpilih pada Pilkades Serentak Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Nama Calon Kades Terpilih	Perolehan Suara
1	Sumbang	Kedungmalang	Teni Purwoko	995
		Ciberem	Yudi Priyanto	2190
		Silado	Iwan Setiawam	636
2	Baturraden	Karangmangu	Cucud Waluyo	1121
3	Ajibarang	Kalibenda	Sarwono	785
		Pancurendang	Narisun	1783
4	Pekuncen	Cibangkong	Kaman	2683
5	Patikraja	Sawangan Wetan	Kuswanto	1114
		Kedungwuluh Lor	Sudarto	1532
		Sidabowa	Ratnaningsih	1777
		Pegalongan	Kasmidi	749
		Wlahar Kulon	Dede Kabul Sulaiman	836
6	Sumpiuh	Kemiri	Suedi	1401
7	Purwojati	Kalitapen	Sahyat	2062
8	Sokaraja	Kalikidang	Priyo Purwanto	1822
		Karangrau	Sugiyono	1741

No	Kecamatan	Desa	Nama Calon Kades Terpilih	Perolehan Suara
		Sokaraja Kidul	Mujino	1337
9	Kembaran	Sambeng Kulon	Sahri Romadon	686
		Kembaran	Kuswanto	1771
		Karangsoka	Heni Pranyoto	1020
		Bojongsari	Aksin Nurwanto	3073
		Tambaksari Kidul	Nuryoko Niti Alam	2056
10	Jatilawang	Bantar	Karsun Muridi	1673
11	Lumbir	Cirahab	Subur Priyanto	922
12	Kebasen	Kebasen	Solekhan	2714
13	Karanglewas	Kediri	Kusto	1377
14	Somagede	Somagede	Widayat	1675

Sumber: Jateng News, 2021

Setiap desa yang mengikuti Pilkades Serentak Kabupaten Banyumas tahun 2021 diselenggarakan dalam sejumlah tahapan yang juga menggambarkan waktu pelaksanaan secara sistematis. Adapun tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan yang dirancang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangrau pada Pilkades Karangrau tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2. 4 Jadwal Waktu Pelaksanaan Pilkades Karangrau Tahun 2021

No	Tahapan/Uraian Kegiatan	Jadwal Waktu
1	Persiapan	
	a. Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas oleh BPD	7 Oktober
	b. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan	14 Oktober
	c. Penyusunan jadwal waktu, RAB, Tatib, dan penetapan TPS	15 Oktober s.d 18 Oktober
	d. Pengajuan permohonan pencairan	20 Oktober
2	Pendaftaran Pemilih	
	a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)	
	- Pemutakhiran data pemilih berdasarkan DPT pemilu terdekat sebagai bahan DPS	21 s.d 22 Oktober
	- Penetapan DPS	22 Oktober

No	Tahapan/Uraian Kegiatan	Jadwal Waktu
	- Pengumuman DPS dan Usulan Perbaikan DPS	23 s.d 26 Oktober
	- Pengumuman perbaikan DPS/ jawaban atas usulan perbaikan DPS	25 s.d 27 Oktober
	b. Daftar Pemilihan Tambahan (DPTam)	
	- Pencatatan data pemilih baru dalam DPTam	29 Oktober s.d 1 November
	- Penetapan DPTam	
	- Pengumuman DPTam dan usulan DPTam	1 November 1 s.d 3 November
	- Pengumuman perbaikan DPTam/ jawaban atas usulan perbaikan DPTam	2 s.d 5 November
	c. Daftar Pemilih Tetap (DPT)	
	- Pengesahan dan Penetapan DPT	6 November
	- Pengumuman DPT	8 s.d 10 November
3	Pengadaan Surat Undangan dan Kelengkapan Lainnya	
	a. Pengadaan surat undangan	11 s.d 13 November
	b. Pembuatan kotak suara/permohonan pinjam kotak suara ke KPU, pengadaan alat coblos, bantalan, dan tinta	11 s.d 13 November
4	Pencalonan	
	a. Pengumuman pendaftaran bakal calon	18 Oktober
	b. Pendaftaran bakal calon	18, 20 s.d 25, 27 s.d 29 Oktober
	c. Penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon	29 s.d 30 Oktober
	d. Melengkapi berkas persyaratan administrasi dan memberikan penjelasan	1 s.d 5 November
	e. Penetapan bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi	6 November
	f. Pengumuman bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi	8 s.d 15 November
	g. Tanggapan Panitia atau keputusan BPD atas keberatan masyarakat	8 s.d 15 November
	h. Rapat pleno penetapan calon kades dan undian nomor urut calon kades	16 November
5	Pencetakan Surat Suara	26 s.d 29 November
6	Kampanye dan Masa Tenang	

No	Tahapan/Uraian Kegiatan	Jadwal Waktu
	a. Kesepakatan Kampanye	6 Desember
	b. Pelaksanaan Kampanye	9 s.d 11 Desember
	c. Masa Tenang	12 s.d 14 Desember
7	Pemungutan Suara	
	a. Pemungutan suara dan perhitungan suara	15 Desember
	b. Penetapan calon kades terpilih	15 Desember
8	Pelaporan panitia pemilihan mengenai calon kades terpilih	15 s.d 16 Desember
9	Pelantikan Kepala Desa terpilih	23 Desember

Sumber: Panitia Pilkades Karangrau, 2021

Pilkades Serentak Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan pada tahun 2021 berjalan lancar dan aman dari awal hingga akhir proses perhitungan suara. Pada penyelenggaraan Pilkades Serentak tahun 2021 terdapat satu-satunya desa yang diikuti oleh pasangan calon yang merupakan suami istri yakni di Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja yang dimenangkan oleh suaminya (calon petahana).

2.4 Gambaran Umum Desa Karangrau

Pada sub bab ini, penulis menjelaskan gambaran singkat tentang Desa Karangrau sebagai lokus penelitian yang mencakup kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial, dan kondisi pemerintahan.

2.4.1 Kondisi Geografis

Desa Karangrau merupakan salah satu desa diantara 18 desa yang ada di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Desa Karangrau mempunyai luas wilayah 0,81 km² dan setara 2,76% dari luas wilayah Kecamatan Sokaraja. Secara

geografis, wilayah Desa Karangrau terletak di ujung Barat Kecamatan Sokaraja yang berbatasan langsung dengan Desa Karangnanas di sebelah timur dan selatan, Kelurahan Berkoh di sebelah utara, Kelurahan Teluk di sebelah barat. Jarak Desa Karangrau dengan ibukota Kecamatan Sokaraja sekitar 5 km, sedangkan jarak Desa Karangrau dengan ibukota Kabupaten Banyumas sekitar 7 km. Wilayah Desa Karangrau terbagi atas 5 RW dan 27 RT yang masing-masing memiliki sebutan daerah tersendiri meliputi:

- Karangrau Gunung : wilayah RW 1 yang terdiri dari 3 RT
- Karangrau Tengah : wilayah RW 2 yang terdiri dari 5 RT
- Karangrau Glemgang : wilayah RW 3 yang terdiri dari 8 RT
- Karangrau Karangsari : wilayah RW 4 yang terdiri dari 9 RT
- Karangrau Tiara Permai : wilayah RW 5 yang terdiri dari 2 RT

Daerah RW 4 dan RW 5 merupakan komplek perumahan, yakni perumahan Karangsari dan perumahan Tiara Permai. Saat ini terdapat 17 kawasan perumahan yang berkembang di Desa Karangrau. Desa Karangrau dipengaruhi iklim daerah tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan.

2.4.2 Kondisi Demografis

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas sebanyak 4.288 jiwa atau 4,50% dari total populasi di wilayah Kecamatan Sokaraja. Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk di Desa Karangrau adalah sebesar 104,50 yang diperoleh dari

perbandingan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 2.190 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.098 jiwa. Adapun kepadatan penduduk di wilayah Desa Karangrau adalah sebesar 5249,38 per km² (BPS Kabupaten Banyumas, 2022).

2.4.3 Kondisi Perekonomian

Desa Karangrau merupakan desa yang berada di pinggiran ibukota Kabupaten Banyumas, yang mana dianggap strategis untuk melangsungkan kehidupan disana. Wilayah Desa Karangrau didominasi oleh pemukiman masyarakat khususnya perumahan yang telah berdiri mencapai 17 kawasan. Kondisi perekonomian masyarakat di Desa Karangrau sangat beragam dilihat dari mata pencahariannya. Mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta, buruh harian lepas, pedagang, dan beberapa juga bekerja sebagai pegawai negeri seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Karangrau secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangrau

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pelajar/Mahasiswa	832	25%
2	Petani/Pekebun	7	0,2%
3	Buruh Tani/Perkebunan	39	1,2%
4	Buruh Harian Lepas	359	11%
5	PNS	121	4%
6	Tenaga Kesehatan	15	0,5%
7	Dosen/Guru	35	1%
8	TNI	7	0,2%
9	POLRI	14	0,4%

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
10	Pensiunan	60	2%
11	Karyawan	60	2%
12	Karyawan Swasta	618	18,5%
13	Pedagang	160	5%
14	Wiraswasta	211	6%
15	Rumah Tangga	785	23%
Jumlah		3324	100%

Sumber: Pemerintah Desa Karangrau, 2021

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Karangrau belum aktif bahkan belum dibentuk kepengurusannya, sehingga pendapatan desa belum maksimal. Selanjutnya, Desa Karangrau memiliki tanah bengkok dengan total 12 bau (8,4 ha/84.000 m²). Total pendapatan dari tanah bengkok tersebut dibagikan kepada perangkat pemerintah Desa Karangrau dengan komposisi 5 bau (3,5 ha/35.000 m²) untuk Kepala Desa, 1.5 bau (1,05 ha/10.500 m²) untuk Sekretaris desa, dan masing-masing 0,7 bau (0,49 ha/4900 m²) untuk Kepala Dusun (Kadus), Kepala Seksi (Kasi), dan Kepala Urusan (Kaur).

2.4.4 Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat di Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja memiliki banyak keberagaman baik dilihat dari segi tingkat pendidikan penduduknya maupun dari segi agama yang dianut. Keberagaman tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Desa Karangrau dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 2. 6 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Karangrau

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata II	22	0,6%
2	Diploma IV/Strata I	315	7%
3	Diploma III	160	4%
4	Diploma I/Diploma II	18	0,4%
5	SMA/Sederajat	1063	25%
6	SMP/Sederajat	599	14%
7	SD/Sederajat	825	19%
8	Tidak/Belum Tamat SD/Sederajat	450	10,5%
9	Tidak/Belum Sekolah	836	19,5%
Jumlah		4288	100%

Sumber: Pemerintah Desa Karangrau, 2021

Fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh Desa Karangrau dalam rangka menunjang pendidikan masyarakatnya meliputi satu Taman Kanak-Kanak (TK) yakni TK Pertiwi Karangrau, satu Sekolah Dasar (SD) yakni SD Negeri Karangrau, dan satu Pos Paud yakni Pos Paud Bunda Lestari.

Mengenai agama, mayoritas masyarakat Desa Karangrau beragama Islam yang mencapai 94%. Fasilitas penunjang kegiatan keagamaan yang ada di Desa Karangrau hanya berupa 5 masjid dan 10 mushola. Sedangkan untuk masyarakat yang memeluk agama Kristen atau Katolik harus melaksanakan ibadahnya di gereja yang ada di wilayah ibukota kabupaten yakni di Purwokerto. Adapun keberagaman dari segi agama yang dianut oleh masyarakat Desa Karangrau disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Jumlah Pemeluk Agama di Desa Karangrau

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	4033	94%
2	Kristen	177	4%
3	Katolik	76	1,5%
4	Budha	2	0,5%
Jumlah		4288	100%

Sumber: Pemerintah Desa Karangrau, 2021

Dalam hubungan sosial kepemudaan, terdapat organisasi karang taruna di Desa Karangrau yang bernama Kusuma Yudha 18. Kegiatan karang taruna dilaksanakan secara aktif oleh para pemuda desa, walaupun hanya pada waktu tertentu saja seperti dalam kegiatan gotong royong desa dan menjadi panitia dalam kegiatan perayaan hari besar keagamaan atau hari kemerdekaan.

2.4.5 Kondisi Pemerintahan

Dari sisi pemerintahannya, Desa Karangrau telah memiliki 5 (lima) nama kepala desa sejak berdiri hingga saat ini. Sejak akhir tahun 2021 hingga saat ini, Desa Karangrau dipimpin oleh seorang petahana yakni Sugiyono, yang telah menjabat selama tiga periode secara berturut-turut. Awal Sugiyono menjabat sebagai kepala desa di Desa Karangrau yakni di tahun 2009. Sebelum periode Kades ke-4 berakhir, Sudar meninggal dunia sehingga di tahun 2008 diselenggarakan Pilkades untuk memilih pemimpin selanjutnya.

Merujuk pada data yang didapatkan peneliti dari arsip Pemerintah Desa Karangrau, kelima nama Kepala Desa Karangrau disajikan dalam Tabel 2.8 di bawah ini:

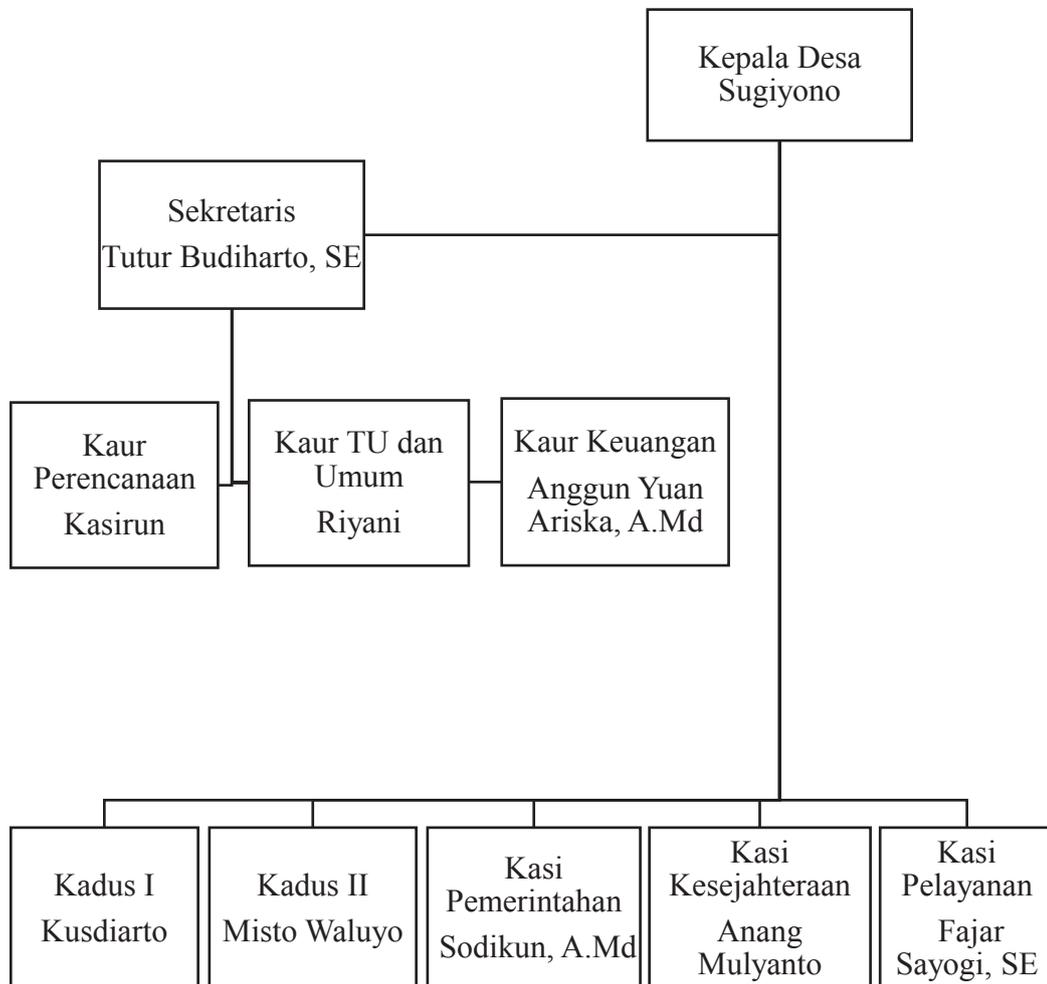
Tabel 2. 8 Daftar Nama Kepala Desa Karangrau

No	Nama	Periode Jabatan
1	Kartiker	1953 s.d 1955
2	Siswo Pranoto	1956 s.d 1988
3	Radisan	1989 s.d 1997
4	Sudar	- 1998 s.d 2006 - 2007 s.d 2008
5	Sugiyono	- 2009 s.d 2015 - 2016 s.d 2021 - 2022 s.d 2027

Sumber: Pemerintah Desa Karangrau, 2024

Saat ini, Desa Karangrau dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 9 orang perangkat desa yang terdiri dari 1 Sekretaris Desa, 2 Kepala Dusun (Kadus), 1 orang Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan, 1 orang Kasi Pelayanan, 1 orang Kasi Pemerintahan, 1 orang Kepala Urusan (Kaur) Umum, 1 orang Kaur Perencanaan, 1 orang Kaur Keuangan. Susunan pemerintahan Desa Karangrau lebih detail disajikan dalam struktur dibawah ini:

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karangrau



Selain itu, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangrau yang beranggotakan 9 orang dengan komposisi 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Anggota BPD secara detail disajikan dalam struktur di bawah ini:

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Karangrau

